

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



***LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2017***



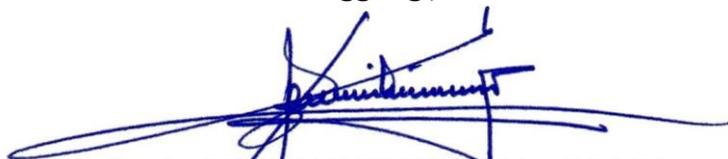
KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HikmatNya sehingga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami berupa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kelautan dan Perikanan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun demikian dengan semangat dan kemampuan yang ada serta dukungan komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilaksanakan. Kami berharap kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan semakin baik dan meningkat setiap tahunnya.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Pangkalpinang, Maret 2018
Penanggung Jawab,



Dr. Ir. BUDIMAN FINTING, DipLBE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH..... | 3 |
| 2.1 VISI DAN MISI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 |
| 2.1.1 VISI..... | 3 |
| 2.1.2 MISI..... | 3 |
| 2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH | 4 |
| 2.2.1 TUJUAN | 4 |
| 2.2.2 SASARAN..... | 5 |
| 2.2.3 STRATEGI KEBIJAKAN..... | 5 |
| BAB III URUSAN PILIHAN..... | 7 |
| BAB IV URUSAN DESENTRA REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017..... | 15 |
| BAB V TUGAS PEMBANTUAN..... | 17 |
| BAB VI PENUTUP | 18 |
| LAMPIRAN | 19 |

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas pokok menurut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2003 yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Melaksanakan pengaturan administrasi dan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
4. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
5. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
6. Melaksanakan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota di bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
8. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha Kelautan dan Perikanan;
9. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas;
11. Melaksanakan peningkatan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat serta melaksanakan pengaturan dibidang Kelautan dan Perikanan;
12. Melaksanakan pembinaan / pengelolaan kelompok fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Kelautan dan Perikanan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pilihan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan yang ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

2.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah, dan menjalankan program daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 - 2017. Sebelum review renstra untuk tahun 2015 - 2017, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **“Terwujudnya Industri Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017”**. Namun, seiring dengan terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang baru periode 2015 - 2019, maka juga terjadi perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen RPJMD ini mengacu kepada dokumen RPJMN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Visi dan misi Presiden terpilih tergambar di dalam RPJMN 2015 - 2019 dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menyesuaikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerahnya. Sebagai salah satu SKPD yang berada di bawah kendali Bapak Gubernur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan merevisi visinya menjadi : **“Mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan”**.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. **Sebelumnya Misi Dinas**

Kelautan dan Perikanan yang mengacu kepada visi awal ada 7 Misi, yaitu:

- 1) ***Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan;***
- 2) ***Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap yang Lestari dan Bertanggung jawab;***
- 3) ***Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;***
- 4) ***Meningkatkan Industri produk olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berdaya saing;***
- 5) ***Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;***
- 6) ***Mengelola dan Memberdayakan Potensi Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;***
- 7) ***Mengelola dan Mengembangkan Industri Jasa Kelautan.***

Setelah adanya perbaikan visi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan juga lebih disederhanakan dengan tetap mengacu kepada **visi dinas yang baru**, menjadi:

1. ***Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Provinsi kepulauan;***
2. ***Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;***
3. ***Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan berbasis Ekonomi Kerakyatan.***

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Gubernur terpilih. Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2.2.2. Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015 - 2017 sebagai penjabaran Visi Misi DKP ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya;
3. Peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan;
4. Peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas *illegal fishing, Unreported & Unregulated (IUU) fishing*;

2.2.3 Strategi Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan diatas, maka beberapa strategi kebijakan yang perlu diambil untuk mensukseskan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat KP dan aparatur KP, strategi yang dilakukan berupa :
 - Pelatihan dan Penyuluhan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan usaha perikanan skala kecil
 - Pendidikan, pelatihan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur KP
 - Penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
2. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, strategi yang dilakukan berupa :
 - Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, pengawakan perikanan
 - Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 - Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
3. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya, strategi yang dilakukan berupa :
 - Pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
 - Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan

- Pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
 - Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
4. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan serta pemasaran hasil perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
- Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil
 - Peningkatan dan pengembangan mutu hasil produksi perikanan
 - Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil produk perikanan
 - Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
5. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
- Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
 - Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

BAB III URUSAN PILIHAN

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diperjelas oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dibidang Kelautan dan Perikanan.

2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut:

| PRIORITAS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN |
|---|---|---|---------------|-------------------------|---------|
| <i>Pembinaan dan Pengembangan Pegawai</i> | <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.390.000 | 10.132.250 (65,84%) | 100% |
| | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 214.800.000 | 158.608.113 (73,84%) | 100% |
| | | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 191.640.000 | 163.680.000 (85,41%) | 100% |
| | | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 32.056.000 | 23.090.850 (72,03%) | 100% |
| | | 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 80.000.000 | 41.502.000 (51,88%) | 100% |

| PRIORITAS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN |
|-----------|---------|--|---------------|-----------------------|---------|
| | | 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 163.000.000 | 163.000.000 (100,00%) | 100% |
| | | 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 65.000.000 | (99,94%) | 100% |
| | | 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 | 12.428.980 (82,86%) | 100% |
| | | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.920.000 | 7.043.000 (88,93%) | 100% |
| | | 10. Penyediaan bahan logistik kantor | 10.250.000 | 6.756.000 (65,91%) | 100% |
| | | 11. Penyediaan makan dan minuman | 53.000.000 | 11.400.000 (21,51%) | 100% |
| | | 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 350.000.000 | (99,36%) | 100% |
| | | 13. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 745.760.000 | 713.240.000 (95,64%) | 100% |
| | | 14. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali | 560.660.000 | 504.997.718 (90,07%) | 100% |
| | | 15. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak | 443.800.000 | 421.916.251 (95,07%) | 100% |
| | | 16. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa | 549.570.000 | 530.923.249 (96,61%) | 100% |
| | | 17. Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) | 482.455.000 | 387.882.546 (80,40%) | 100% |

| PRIORITAS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN |
|-----------|---|---|---------------|----------------------|---------|
| | | 18. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah | 171.160.000 | 165.699.700 (96,81%) | 100% |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 221.866.000 | 199.800.000 (90,05%) | 100% |
| | | 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor | 100.000.000 | 96.367.000 (96,37%) | 100% |
| | | 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTDBBIAP Tanjung Krasak | 83.600.000 | 78.100.000 (93,42%) | 100% |
| | | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | 575.350.000 | 278.940.370 (48,48%) | 100% |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur | 140.000.000 | 94.369.550 (67,41%) | 100% |
| | | 2. Penilaian Angka Kredit | 18.470.000 | 10.817.850 (58,57%) | 100% |
| | Program Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 249.315.000 | 241.847.810 (97,00%) | 100% |
| | | 2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 108.650.000 | 90.624.900 (83,41%) | 100% |
| | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 1. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK) | 654.000.000 | 14.040.000 (2,15%) | 2,39% |
| | | 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK) | 400.000.000 | 107.015.000 (26,75%) | 27,74% |
| | | 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK) | 1.500.253.000 | 588.384.000 (39,22%) | 39,97% |

| PRIORITAS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN |
|-----------|--|---|---------------|------------------------|---------|
| | | 4. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali | 268.370.000 | 254.466.000 (94,82%) | 100% |
| | | 5. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak | 320.840.000 | 315.188.560 (98,24%) | 100% |
| | | 6. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa | 393.100.000 | 381.184.000 (96,97%) | 100% |
| | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan | 745.155.600 | 409.545.200 (54,96%) | 100% |
| | | 2. Pengolahan data statistik perikanan tangkap | 0 | 0 (0,00%) | 0,00% |
| | | 3. Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan | 329.908.000 | 57.993.664 (17,58%) | 100% |
| | | 4. Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan | 214.520.000 | 9.132.000 (4,26%) | 10,30% |
| | | 5. Kajian prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk Nelayan 3 GT | 306.960.000 | 298.444.200 (97,23%) | 100% |
| | | 6. Pilot project penggunaan energi Bayou untuk Kapal Nelayan | 221.520.000 | 0 (0,00%) | 0,00% |
| | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | 1. Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan | 181.660.000 | 49.935.500 (27,49%) | 100% |
| | | 2. Pengembangan dan pembinaan promosi serta kerjasama pemasaran hasil perikanan | 465.119.500 | 402.128.300 (86,46%) | 100% |
| | Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya | 1. Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2.902.450.000 | 1.651.797.710 (56,91%) | 90% |

| PRIORITAS | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN |
|-----------|---|---|---------------|----------------------|---------|
| | <i>Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Perikanan</i> | 2. Peningkatan Fungsi BOOST Center | 146.880.000 | 113.344.350 (77,17%) | 100% |
| | | 3. Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 844.120.500 | 403.491.849 (47,80%) | 99,59% |

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional disajikan pada tabel berikut:

| NO | KRITERIA | RINCIAN | JML PNS | JML CPNS | TOTAL |
|----|-----------------------------|-----------------|---------|----------|-------|
| I | Berdasarkan Pangkat/ Gol | Gol. IV | 12 | - | 12 |
| | | Gol. III | 78 | - | 78 |
| | | Gol. II | 22 | - | 22 |
| | | Gol. I | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | | 113 | - | 113 |
| II | Berdasarkan Pendidikan | S3 | - | - | - |
| | | S2 | 15 | - | 15 |
| | | S1 | 56 | - | 56 |
| | | D. IV | 5 | - | 5 |
| | | D. III | 13 | - | 13 |
| | | D. II | 2 | - | 2 |
| | | D. I | - | - | - |
| | | SMA / sederajat | 22 | - | 22 |
| | | SMP/ sederajat | - | - | - |
| | | SD / sederajat | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | | 113 | - | 113 |

| NO | KRITERIA | RINCIAN | JML PNS | JML CPNS | TOTAL |
|-----|---------------------|--------------|---------|----------|-------|
| III | Berdasarkan Jabatan | Struktural | | | |
| | | - eselon II | 1 | - | 1 |
| | | - eselon III | 8 | - | 8 |
| | | - eselon IV | 27 | - | 27 |
| | | Fungsional | 17 | - | 17 |

Pada tabel dapat dilihat jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 113 orang. Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada sebanyak 37 namun jumlah pejabat yang terisi sebanyak 36. Jabatan Fungsional Tertentu ada sebanyak 17 orang yang terdiri dari 15 Pengawas Perikanan, 1 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan 1 Pranata Humas.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | BELANJA LANGSUNG | | TOTAL BELANJA | REALISASI | % |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | | | |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 13.381.866.651 | 12.638.522.562 | 15.543.568.600 | 9.881.969.830 | 28.925.435.251 | 22.520.492.392 | 77,86 |

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai dengan Renstra dan Renja.

7. Kondisi Sarana / Prasarana Yang Digunakan

| PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA | | | KETERANGAN |
|---|------------------------------|--------|-----------|------------|
| | LENGGAP | KURANG | MENCUKUPI | |
| Dengan analisa permasalahan berdasarkan tupoksi dan dibahas dalam musrenbang. | - | - | √ | |

a. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

1. Penyerapan kegiatan DAK UPTD Tiga Balai Benih yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pejabat Dinas, bukan pejabat di Balai masing-masing, sehingga terkendala dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan, baik itu penyiapan dokumen lelang maupun teknis pelaksanaan lainnya.
2. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga terkendala adanya peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK 2017 harus sudah memiliki Kontrak paling lambat 31 Agustus 2017 dan setelah tanggal tersebut menjadi tanggungjawab APBD untuk membayarnya.
3. Pembayaran Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termin ke III yang tidak dapat dibayar penuh kepada pihak ketiga, hal ini disebabkan pekerjaan melewati tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 18 Desember 2017. Sedangkan pada syarat khusus kontrak, pembayaran termin ketiga berupa laporan akhir yang sudah dikonsultasi tekniskan di KKP pada tanggal 21 Desember 2017. Disamping itu pada draft laporan akhir belum ada kesepakatan terhadap alokasi ruang karena konsultasi public baru dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017.
4. Terdapat dua kegiatan prioritas pada APBD Perubahan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pilot Project penggunaan mesin tempel alternatif non bbm dan gas ukuran mesin 5 PK untuk kapal nelayan dan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu untuk Kapal Nelayan. Dua kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey di lapangan tidak ada satu pun distributor, supplier, toko atau agen yang menyediakan atau ada persediaannya. Untuk pengadaan barang tersebut harus memesan terlebih dahulu.

2. Solusi

1. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai di Tahun 2017;
2. Menempatkan orang yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik;

3. Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembayaran Termin ketiga kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diajukan kembali pembayarannya melalui APBD Perubahan 2018.
4. Untuk pengadaan pilot project yang tidak umum (barang – barang) yang sulit dicari di pasaran akan dianggarkan kembali pada APBD Induk agar cukup waktu untuk melaksanakannya.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 program nasional yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Dan Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan. Dalam pelaksanaanya kedua program nasional tersebut dijabarkan ke dalam 4 program. Adapun 4 program tersebut yaitu:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
3. Program Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
4. Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN (TP)

1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. TP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 032.03.4.3090171/2018, Tanggal : 7 Desember 2017

2. Instansi Pemberi TP

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

3. Program dan Kegiatan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terdiri dari 1 Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, dan 2 kegiatan (Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya).

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

| PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya | a. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan | 324.000.000,- | 316.525.000,- |
| | b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya | 126.000.000,- | 120.968.600,- |
| TOTAL | | 450.000.000,- | 437.493.600,- |

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber Anggaran yang digunakan berasal dari Dana TP dengan jumlah ANgggaran Rp 450.000.000,-

6. SKPD yang melaksanakan TP

SKPD yang melaksanakan TP dari Dirjen Perikanan Budidaya ini adalah SKPD-TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

| NO | KRITERIA | RINCIAN | JML PNS | JML CPNS | TOTAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------|-------|
| I | Berdasarkan Pangkat/ Gol | Gol. IV | 12 | - | 12 |
| | | Gol. III | 78 | - | 78 |
| | | Gol. II | 22 | - | 22 |
| | | Gol. I | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | | 113 | - | 113 |
| II | Berdasarkan Pendidikan | S3 | - | - | - |
| | | S2 | 15 | - | 15 |
| | | S1 | 56 | - | 56 |
| | | D. IV | 5 | - | 5 |
| | | D. III | 13 | - | 13 |
| | | D. II | 2 | - | 2 |
| | | D. I | - | - | - |
| | | SMA / sederajat | 22 | - | 22 |
| | | SMP/ sederajat | - | - | - |
| SD / sederajat | 1 | - | 1 | | |
| | Jumlah | | 113 | - | 113 |
| III | Berdasarkan Jabatan | Struktural | | | |
| | | - eselon II | 1 | - | 1 |
| | | - eselon III | 8 | - | 8 |
| | | - eselon IV | 27 | - | 27 |
| | Fungsional | 17 | - | 17 | |

8. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi

9. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan TP Ditjen Perikanan Budidaya. Realisasi kegiatan sebesar 97,22%.

BAB VI PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung urusan kelautan dan perikanan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu LPPD informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Berbagai capaian kinerja seperti Jumlah Produksi Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan.telah diraih dalam penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | BELANJA LANGSUNG | | | | | | TOTAL BELANJA | REALISASI | % |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | BELANJA PEGAWAI | | BELANJA BARANG DAN JASA | | BELANJA MODAL | | | | |
| ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI | | | |
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 13.381.866.651 | 12.638.522.562 | 2.751.555.000 | 2.264.505.000 | 9.590.094.600 | 6.079.315.630 | 3.201.919.000 | 1.538.149.200 | 28.925.435.251 | 22.520.492.392 | 77,86 |

LAMPIRAN I. 2:
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PROVINSI

: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD PENANGGUNG JAWAB

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | Jenis Data | Capaian Kinerja |
|---|---|---|----|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD | 1 | Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD | - Jumlah program nasional (RKP) Sebanyak 2 Program - Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 Program | 2 ----- x 100% = 100% 2 |
| | | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND | 2 | Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP) | Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD | Ada (SOP) Perizinan Kapal |
| 2 | KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) | 3 | PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN | - Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2 - Perda yang seharusnya sebanyak 2 | 2 ----- x 100% = 100% 2 |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH | Pengisian Struktur Jabatan | 4 | Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi | - Jabatan yang ada sebanyak 36 - Jabatan yang harus ada sebanyak 37 | 36 ----- x 100% =97,29% 37 |
| | | | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Ada yaitu : 1. Pengawas Perikanan 2. Pranata Humas 3. Pengendali Hama Penyakit Ikan | Ada (17 orang) |

| | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | Jenis Data | Capaian Kinerja |
|---|--------------------------------|---|----|--|---|---|
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait | 6 | Rasio PNS Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> - PNS SKPD, sebanyak 113 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.386 personil | 113 ----- x 100% =2,098 % 5.386 |
| | | | 7 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 36 - Pejabat yang ada, sebanyak 36 orang | 36 ----- x 100% =100% 36 |
| | | | 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 36 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 36 jabatan | 36 ----- x 100% =100% 36 |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD | 9 | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD <ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - Renstra - Renja - RKA (3 jenis dokumen) |
| | | Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd | 10 | Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program | 4 ----- x 100% = 100% 4 |
| | | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD | 11 | Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program | 4 ----- x 100% =100% 4 |
| | | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran | 12 | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program | 4 ----- x 100% =100% 4 |

| | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | Jenis Data | Capaian Kinerja |
|---|---------------------------------|--|----|--|---|--|
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Alokasi Anggaran | 13 | Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD | - Total anggaran SKPD sebesar Rp. 28.925.435.251 - Total APBD sebesar Rp. 2.598.986.042.215,22 | 28.925.435.251 ----- x 100% 2.598.986.042.215,22 = 1,112% |
| | | Besaran belanja modal (realisasi) | 14 | Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) | - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.538.149.200 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.520.492.392 | 1.538.149.200 -----x 100% 22.520.492.392 = 6,829% |
| | | Besaran belanja pemeliharaan (realisasi) | 15 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) | - Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.152.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.079.315.630 | 196.152.000 -----x 100% 6.079.315.630 = 3,23% |
| | | | 16 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) | - Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 196.152.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.520.492.392 | 196.152.000 -----x 100% 22.520.492.392 = 0,87 % |
| | | Laporan keuangan SKPD | 17 | Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk) | Laporan Keuangan (ada 5 jenis) | Komponen yang ada: - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Manajemen aset SKPD | 18 | Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD | Daftar barang atau asset SKPD yang aktif | Ada (dalam berita acara rekonsiliasi aset) |
| | | Penggunaan Asset SKPD | 19 | Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % | - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 110.316.425.139,49 | 0 ----- x 100% 110.316.425.139,49 = 0 % |

| | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | Jenis Data | Capaian Kinerja |
|---|--|--|----|--|--|---|
| 8 | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat | 20 | Jumlah fasilitas / prasarana informasi : <ul style="list-style-type: none"> - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass Media | Sebanyak 4 Jenis, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Papan Pengumuman - Leaflet Produk Perikanan - Mobil Pengawas Perikanan - Website | <ul style="list-style-type: none"> - Papan Pengumuman - Leaflet Produk Perikanan - Mobil Pengawas Perikanan - Website |
| | | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat | 21 | Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat | Dokumen kuesioner dan nama petugasnya | Tidak Ada |

LAMPIRAN I.3
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| NO | URUSAN | NO | IKK | RUMUS | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|-----------------------|----------------------|-----|------------------------|---|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| URUSAN PILIHAN | | | | | | |
| 1 | Kelautan & perikanan | 1 | Produksi perikanan | $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}$ | 98,,15% | $\frac{687,05}{7}$ |
| | | 2 | Ekspor hasil perikanan | $\frac{\text{Nilai export hasil perikanan (kg)}}{\text{Target daerah (Kg)}}$ | 94,3% | $\frac{58.464.468.000}{62.000.000.000} \times 100\%$ |
| | | 3 | Konsumsi ikan | $\frac{\text{Rata-rata Jumlah Capaian Konsumsi ikan Kabupaten dan Kota}}{\text{Rata-rata Jumlah target seluruh Kabupaten dan Kota}}$ | 100,98 % | $\frac{706,87}{7}$ |